

**SKRIPSI**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM  
PADAT KARYA TUNAI DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI DESA SELUTUNG KECAMATAN MANDOR, KABUPATEN LANDAK,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Disusun Oleh:

**RAMIDA BERNADED**

**NIM: 18520269**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**

SKRIPSI

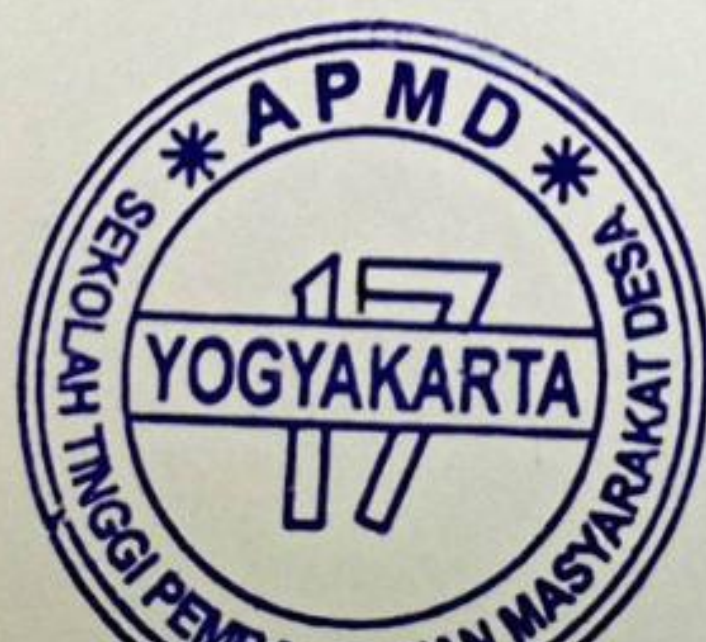
**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PADAT KARYA  
TUNAI DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI DESA SELUTUNG KECAMATAN MANDOR, KABUPATEN LANDAK,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang  
Pendidikan Strata Satu (S1)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

2022



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Juni 2022  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

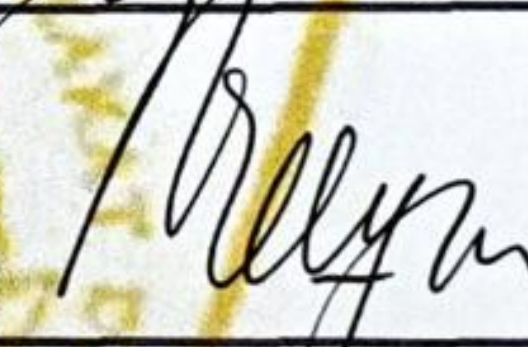
NAMA

TANDA TANGAN

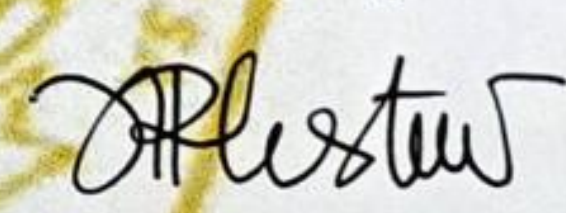
Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D  
Ketua/Penguji/Pembimbing



Ir. Nelly Turmida, MPA  
Penguji Samping I

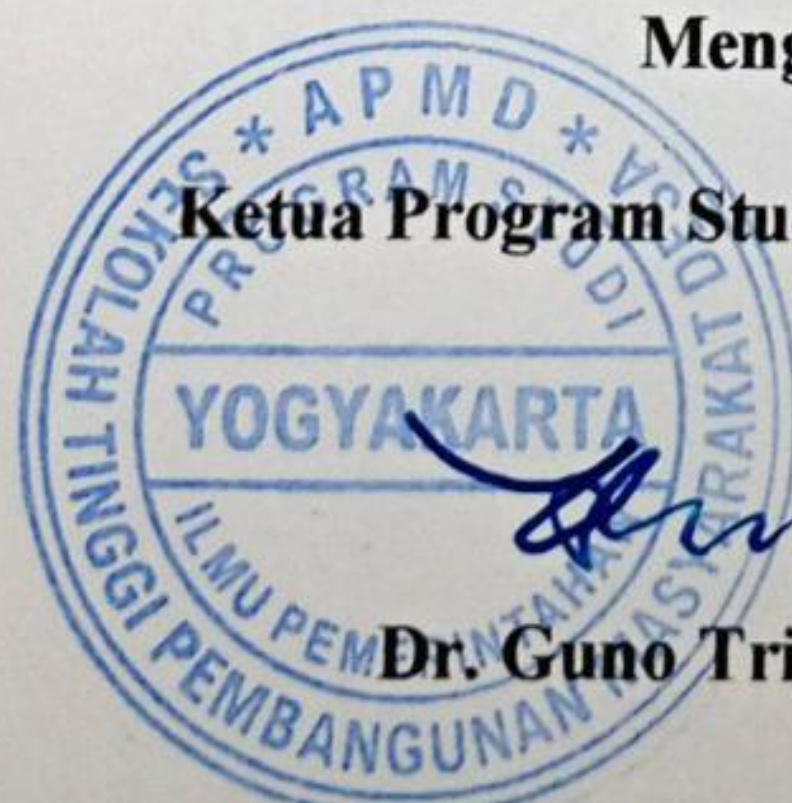


Utami Sulistiana, S.P, M.A.  
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan





Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramida Bernaded

Nim : 18520269

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Program Padat Karya Tunai Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 14 juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ramida Bernaded

## **MOTTO**

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada  
pengertianmu sendiri”

(Amsal 3:5 )

*“Being ahead doesn’t mean going first, look far away, take your time, no need rush  
my pace, don’t compare, its okay to run slowly , follow my road my lane and put  
down your heart”*

*(Stray Kids, My Face)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar.

Karya berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat kemurahan dan penyertaan-Nya.
2. Untuk Bapak saya Adin dan ibu saya Banian. Kedua orang tua saya telah memberikan dukungan pendampingan sepenuhnya pada setiap langkah perjalanan hidup saya, dan pula memberikan kepercayaan sepenuhnya serta selalu mendoakan saya di setiap perkuliahan saya sehingga penulisan karya ini selesai. Terima kasih kalian sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan bersyukur atas jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada saya.
3. Kepada kakak saya Ressay Sagita, yang menjadi donatur dan selalu memberikan nasehat yang menuntun saya untuk mendapatkan kepercayaan diri. Terima kasih atas dukungan serta dukungan doa.
4. Kepada seluruh keluarga besar saya, abang saya Fredi Lavendo, kakak ipar saya Natalia, dan keponakan saya Petra dan Aretha, serta kakak sepupu saya Pebri Yanti Batuah, terima kasih untuk semua pertolongan, dukungan, inspirasi serta menjadi sumber kebahagiaan bagi saya.
5. Kepada teman-teman satu perjuangan saya sejak masa SMA yang selalu bersama dalam suka maupun duka Gust Velly, Marta Koni, Oktaviana, Dara,

6. Nanda, Dina, Dan Henadia. terima kasih atas pertolongan dan ketulusan yang kalian berikan selama ini.
7. Kepada teman-teman yang telah menjadi partner dan sahabat selama masa perkuliahan, Evi Maysari, Elsa Sinaga, Niken Salvia. Terima kasih telah menemani saya selama masa perkuliahan.
8. Kepada seluruh member *Stray Kids* Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han Jisung, Felix, Seungmin, Dan IN. Terima kasih untuk selalu menjadi rumah bagi saya, dan untuk semua karya kalian yang menginspirasi dan menghibur saya.





## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat penyertaan dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Program Padat Karya Tunai Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat”. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademik, untuk mendapatkan titel akademik pada strata 1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun susunan bahasa. Oleh karena itu dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Bantuan berupa bimbingan saran, nasihat, serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth. :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

3. Ibu Rr.Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing skripsi dengan baik dan sabar dalam membimbing serta memberikan saran-saran selama penulisan skripsi
4. Ibu Dra, Sri Utami, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dan menyemangati saya selama saya berada di kampus.
5. Bapak /Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan STPMD ”APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, maka peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, Juni 2022

Ramida Bernaded  
NIM:18520269

## INTISARI

Perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah baru yaitu terjadinya Pandemi *Covid-19* yang merupakan peristiwa menyebarnya penyakit *Coronavirus* 2019 di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki catatan kasus cukup besar sejak awal tahun 2020. Salah satu dampak terbesar yaitu tingkat pengangguran yang semakin tinggi, sementara itu di tengah terjadinya peristiwa ini, pemerintah mengharapkan desa tetap dapat membangun. karena itu dalam program pembangunan dan masalah pengangguran di desa, pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 telah meluncurkan sebuah program yang dinamakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai dijelaskan bahwa Padat Karya Tunai Desa merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan Fisik di desa yang menerapkan sistem pembangunan berskala desa, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat di desa setempat. Namun pada masa pandemi pemerintah desa tidak dapat melaksanakan dengan maksimal setiap pembangunan yang ada di desa. Hal ini disebabkan anggaran dana desa yang sebagian besar dialokasikan untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu ditentukan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Program Padat Karya Tunai Desa Di Desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan perspektif *governability*. Unit analisis dari penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa yang terlibat dalam program Padat Karya Tunai Desa di Desa Selutung. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Adanya pengurangan anggaran dana untuk pembangunan desa tidak menghalang desa untuk tetap dapat melakukan pembangunan pada masa pandemi kapasitas pemerintah desa dalam tingkatan individu, dan dalam pelaksanaannya terdapat pemerintah desa dan masyarakat desa yang bekerjasama dalam pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa adanya kapasitas individu yang dimiliki oleh pemerintah desa Selutung. Baik itu dalam pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya desa. 2) kapasitas organisasi, atau proses pelaksanaan PKT memiliki tingkat kesulitan yang cukup banyak sehingga pemerintah desa kadangkala tidak bisa mengimbangi perubahan ataupun aturan yang ada, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan tujuan dari program PKT desa tersebut. 3) kapasitas sistem dari program ini belum dibangun secara hukum tertulis di desa Selutung, namun dalam pengambilan keputusannya pemerintah desa tetap mementingkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Kapasitas Pemerintah Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>INTISARI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Literatur Review .....	14
F. Kerangka Konseptual.....	19
1. Pemerintah Desa .....	19
2. Kapasitas Pemerintah Desa.....	22
3. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19).....	26
4. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).....	28
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
H. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3. Unit Analisis .....	35
4. Teknik Pemilihan Informan .....	36
5. Sumber Data.....	37
6. Metode Pengumpulan Data.....	39
7. Teknik Validasi Data .....	48
8. Metode Analisis Data.....	49

<b>BAB II</b> .....	51
<b>PROFIL DESA SELUTUNG</b> .....	51
A. Sejarah Desa.....	51
B. Kondisi Geografis Desa .....	51
C. Demografi Desa .....	52
1. Data Penduduk.....	52
2. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	53
3. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
D. Keadaan Sosial, Ekonomi Dan Budaya .....	57
1. Keadaan Sosial.....	57
2. Keadaan Ekonomi.....	59
3. Kondisi Budaya.....	60
E. Sarana Dan Prasarana.....	60
1. Pendidikan.....	60
2. Perhubungan .....	62
3. Komunikasi .....	62
4. Penerangan.....	63
5. Sarana dan prasarana kesehatan .....	63
F. Struktur Organisasi Desa .....	64
G. Visi Dan Misi.....	67
1. Visi.....	67
2. Misi .....	68
H. Data Aparat Pemerintah Desa.....	69
I. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa .....	71
1. Kepala Desa .....	71
2. Sekretaris Desa.....	72
3. Urusan Keuangan.....	73
4. Urusan Tata Usaha Dan Umum .....	75
5. Urusan Perencanaan.....	76
6. Seksi Pemerintahan.....	77
7. Seksi Kesejahteraan .....	79
8. Seksi Pelayanan .....	80

9. Pelaksana Kewilayahan.....	81
J. Data Personil BPD .....	82
K. Lembaga Desa.....	83
L. Prioritas Pembangunan Desa Selutung .....	84
M. Alokasi Dana Desa Dan Dana Pembangunan Desa Di Desa Selutung. ....	87
N. Alokasi Dana Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Padat Karya Tunai Desa	91
<b>BAB III.....</b>	<b>94</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kapasitas Individu .....	94
1. Pendidikan.....	97
2. Pengalaman .....	101
B. Kapasitas Organisasi.....	104
1. Sistem Pelaksanaan.....	105
2. Struktur Organisasi .....	106
3. Prosedur Dan Mekanisme .....	108
4. Sarana Dan Prasarana.....	112
C. Kapasitas Sistem .....	112
<b>BAB IV .....</b>	<b>115</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
1. Kapasitas Individu .....	115
2. Kapasitas Organisasi.....	116
3. Kapasitas Sistem .....	117
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah baru yaitu terjadinya Pandemi *Covid-19* yang merupakan peristiwa menyebarnya penyakit *Coronavirus* 2019 di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki catatan kasus cukup besar sejak awal tahun 2020. Peristiwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan umat manusia, namun juga pada perekonomian nasional. Tingkat kemiskinan Indonesia juga mengalami peningkatan, pada 15 Juli 2021 BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 yaitu 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin, angka ini masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada september 2019 yaitu 9,22% (Izzati R I, 2021).

Daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi beresiko terdampak pandemi Covid-19, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari pandemic Covid-19 sampai pada masyarakat kecil di pedesaan. Perekonomian Indonesia mengalami berbagai bentuk masalah seperti melambatnya proses produksi perusahaan industri, berkurangnya pengunjung sektor pariwisata dan lain sebagainya. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan

tetap dan buruh harian yang kehilangan pekerjaan mereka. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat statistik pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 % (persen ) dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk merupakan pengangguran terbuka. Menurut Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan dalam tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2020 ( Adryanto, 2021). Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut menimbulkan pendapatan masyarakat juga berkurang. Ketika pendapatan masyarakat menurun, maka pendapatan nasional juga akan menurun hal ini memberi dampak pada kemiskinan.

Untuk mencegah penyebaran virus corona dan menanggulangi dampaknya bagi masyarakat Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, presiden Indonesia menetapkan 3 peraturan terkait sebagai bentuk penanggulangan pandemi Covid-19. Yang pertama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) (Kepres no,11 tahun 2020). Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) (PP NO, 11/2020), dan Yang Ketiga Yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus disease (Covid-19)* Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas

Sistem Keuangan (Perpu no, 1/2020). Pemerintah mengupayakan agar kebijakan tersebut dapat membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui meskipun pemerintah Indonesia tidak melakukan *lockdown* secara nasional seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, karena dengan adanya wabah ini perekonomian akan mati jika dilakukan *lockdown* di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan seperti belajar, bekerja dan beribadah di rumah, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota yang mempunyai kasus terbanyak, untuk mencegah penyebaran virus ini ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin dan hindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan (seperti batuk dan bersin).

Dalam program pembangunan dan masalah pengangguran di desa, pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 telah meluncurkan sebuah program yang dinamakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai dijelaskan bahwa Padat Karya Tunai Desa merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan Fisik di desa yang menerapkan sistem pembangunan berskala desa, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat di desa setempat. Padat karya tunai merupakan pembangunan desa yang didanai oleh dana desa. Pada implementasinya, PKT memberikan beberapa keuntungan bagi desa dan masyarakat

desa. Selain pembangunan fisik dapat terlaksana pekerjaan fisik juga dikelola langsung oleh masyarakat desa yang digaji dengan sistem Harian Orang Kerja (HOK), besaran HOK yang ditetapkan adalah 30%(persen) dari seluruh biaya kegiatan PKT Desa dan penggunaan dana desa tepat sasaran yaitu untuk memberikan lapangan pekerjaan serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat desa dengan demikian tidak hanya pembangunan yang meningkat namun juga diharapkan program ini dapat membantu masyarakat miskin di desa. Pada tahun 2020 di keluarkan peraturan terbaru tentang Padat Karya Tunai Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan untuk pelaksanaan PTK pada masa pandemic tentunya harus menerapkan protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

Dan dalam kondisi ini melalui program PKTD , Desa menjadi harapan

Negara untuk tetap dapat berkembang meskipun di tengah pandemi. Dikutip dari artikel yang berjudul Padat Karya Tunai untuk tangkal dampak Covid-19 di desa dalam artikel tersebut Presiden joko widodo mengatakan dalam rapat terbatas meminta kepada jajarannya di kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program padat karya tunai desa dipercepat, dengan demikian penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan sosial dan program PKT Desa, serta program PKT ini sangat membantu kehidupan ekonomi masyarakat desa dan juga dapat mendukung ketahanan pangan di masa pandemic Covid-19 (Novrizaldi,2020). Artinya peran pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil Negara sangat diperlukan untuk menanggulangi penyebaran virus corona di desa. Desa juga diharapkan untuk tetap membangun dan mengembangkan sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya alam maupun sumber daya manusianya. Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya.

Diluar dari fungsi PKTD yang sangat membantu masyarakat desa dalam pembangunan dan lapangan pekerjaan dalam sebuah artikel dijelaskan isu-isu publik yang terjadi sejak dilaksanakannya PKTD. Artikel ini diterbitkan oleh SMERU (2018) yaitu sebuah lembaga penelitian independen, lembaga ini melakukan penelitian yang berjudul “Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai” dan dilakukan di kabupaten Banyumas provinsi jawa Tengah. penelitian ini menyajikan tentang permasalahan pada program PKT Desa yang perlu pemerintah

perhatikan yaitu .Pertama inefisiensi anggaran dimana Desa harus memenuhi ketentuan minimal 30% dari Dana Desa Kegiatan Pembangunan untuk membayar upah tenaga kerja. Namun, biasanya anggaran untuk upah tenaga kerja tidak mencapai proporsi tersebut—hanya berkisar 15%– 25%.<sup>6</sup> Oleh karena itu, ketentuan tersebut justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sebesar 5%–15%. Kedua Kualitas hasil pekerjaan Sistem perekrutan tenaga kerja PKT yang terbuka menghasilkan rekrutan yang tidak selalu berkeahlian. Pemerintah desa (pemdes) tentu harus repot menyeleksi calon tenaga kerja dan memastikan bahwa rekrutan sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk posisi tenaga kerja ahli dan pembantu tenaga kerja ahli. Jika pemdes keliru dalam merekrut tenaga kerja, kualitas hasil pekerjaan menjadi taruhannya. Ketiga Persoalan data kelompok sasaran Data warga marginal yang menjadi sasaran PKT tidak tersedia di desa. Pemdes mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi mereka karena tidak ada acuan yang jelas tentang kriteria sasaran PKT, termasuk kriteria penganggur dan setengah penganggur, serta keluarga yang beranggotakan anak balita penderita gizi buruk. Selanjutnya Pada masa pandemi pelaksanaan PKTD berbeda dari pelaksanaan sebelum pandemi. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan artikel berikut yang berjudul “Artikel Opini: BLT-DD Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, Bagaimana dengan Infrastruktur?”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa

*“Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Beberapa di antaranya adalah dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa, dan kegiatan-kegiatan lain dalam hubungannya dengan upaya desa tanggap Covid-19. prioritas*

*pelaksanaan BLT-DD menjadi yang paling diutamakan dalam percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang semula direncanakan dalam APBDesa awal tahun 2020 tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Bahkan, kebanyakan rencana pembangunan infrastruktur tidak dapat direalisasikan.*

*(<http://sepang-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/675-Artikel-Opini--BLT-DD-Jadi-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021--Bagaimana-dengan-Infrastruktur->)*

Dari artikel diatas memberikan gambaran secara umum bagaimana prioritas penggunaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan pada masa pandemi, fenomena tersebut juga terjadi pada Desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. yang merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan, program ini sudah terlaksana sejak tahun 2018 dan melalui program ini masyarakat di desa Selutung dapat menikmati pembangunan di Desa berupa jalan rabat beton, Jalan Usaha Tani (JUT), Gedung Posyandu, gedung PAUD dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat merasa puas dengan adanya program tersebut karena masyarakat dapat menikmati hasil pekerjaan mereka sendiri dan menikmati upah hasil pekerjaan fisik tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat menikmati dana Desa secara langsung baik melalui hasil bangunan fisik maupun HOK yang mereka terima. HOK diambil dari 30% seluruh dana untuk satu pembangunan fisik yang dibagi kepada masing-masing Kepala tukang,tukang dan para pekerja. Semua pekerja dan tukang merupakan masyarakat asli di Desa.

Namun saat Pandemic Covid-19 mayoritas penduduk di desa Selutung yang bekerja sebagai petani, buruh lapangan di perkebunan sawit, dan penambang, harus



berhenti untuk sementara waktu dari pekerjaan mereka, hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang. Terjadinya pandemic Covid-19 juga menyebabkan pelaksanaan PKT Desa di desa Selutung tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, beberapa rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan dengan mudah, karena pemerintah desa harus mengutamakan penggunaan Dana Desa untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kemudian sisa dana dana tersebut baru dapat digunakan untuk pelaksanaan PKT Desa sehingga dana pelaksanaan PKT desa untuk melaksanakan pembangunan fisik desa juga berkurang, dan pada masa pandemi pelaksanaan PKT desa harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, sementara itu program padat karya tunai desa yang ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan juga tidak dapat melibatkan masyarakat dengan dengan jumlah yang banyak, dengan demikian kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi juga sedikit, karena harus menghindari kerumunan, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dapat memaksimalkan pelaksanaan program PKTD ditengah terjadinya pandemic Covid-19, yang dapat membantu desa untuk tetap membangun serta meningkatkan pendapatan masyarakatnya, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa di tengah terjadinya wabah coronavirus dan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemic covid -19 baik dalam bidang kesehatan, perekonomian serta pekerjaan mereka.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa maka desa dapat memaksimalkan pelaksanaan PKTD pada masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Dan pemerintah desa juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dalam pasal 22 ayat satu (1) disebutkan bahwa penugasan dari pemerintah dan/pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa memiliki hak otonomi untuk dapat mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu bentuk otonomi desa adalah melaksanakan pembangunan desa. Dengan demikian untuk melihat kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan PKTD peneliti tertarik melakukan penelitian yang menggunakan perspektif Governability. Perspektif governability melihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi (Eko,2013:65).

PKT Desa dilaksanakan sejak tahun 2018 dan sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, sebelum terjadinya pandemi Covid-19 banyak penelitian yang dilakukan yang merujuk pada pelaksanaan dan keberhasilan dari program ini, baik itu dari segi pembangunan, Penanganan kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa, namun karena program ini termasuk peraturan baru sedikit penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2020 ke atas, Pada penulisan penelitian ini peneliti sadar masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mencari dan memahami berbagai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam proses penulisan ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu Maka dalam kajian pustaka ini peneliti uraikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama* penelitian ini dilakukan oleh Ujang (2021) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di dua desa yaitu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dari Penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan PKT Desa di kabupaten jembrana sudah berjalan dengan baik, dan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya dalam pemberdayaan kelompok masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat menganggur maupun setengah menganggur serta mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam

pembangunan desa. Namun PKT Desa belum memenuhi kriteria kecukupan dan pemerataan karena kebijakan padat karya tunai belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan penghambat pelaksanaan PKT Desa adalah pemerintah desa yang kesulitan dalam memenuhi kriteria minimal 30% (persen) upah pekerja dari keseluruhan dana kegiatan PKT Desa.

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Hendriyana (2019) yang berjudul Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Provinsi Jawa Barat dan Riau, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik survey dan wawancara dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Program PKT tidak dapat dilaksanakan terhadap pedesaan yang sudah mandiri dan maju. Hal ini dikarenakan fasilitas infrastruktur Desa sudah tersedia dan memadai, sehingga tidak efektif apabila program PKT tetap dilaksanakan di Desa mandiri dan maju tersebut. Kemudian Pemerintah Pusat/Daerah telah melakukan sosialisasi sebelum penerapan program PKT. Sosialisasi tersebut telah memberikan kejelasan program secara cukup yang disertai dengan pedoman yang lengkap. Namun di sebagian kecil Desa sampel, terdapat keluhan akan minimnya pedoman teknis lanjutan terkait pelaksanaan PKT yang belum sesuai dengan kebutuhan.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Padat Karya Tunai sudah terlaksana dengan baik, baik secara fungsi pelaksanaan maupun

manfaatnya bagi masyarakat desa, akan tetapi ada beberapa kekurangan dari pelaksanaan program ini yaitu sistem pelaksanaan program khususnya dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang mengharuskan pengalokasian HOK yang sebesar 30% yang kurang efektif untuk memaksimalkan pembangunan di desa, serta belum ada pengarahan yang jelas tentang sasaran dari program ini. dan juga pelaksanaannya yang temporer tidak dapat menjamin program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa secara permanen. Berbeda dari kedua penelitian diatas, peneliti akan menggunakan salah satu dari 5 perspektif ilmu pemerintahan yaitu *governability*, perspektif ini akan menjelaskan lebih dalam bagaimana kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya atau tata kelola pemerintah secara politik (*kebijakan, authonomy and devolution of power*) ekonomi dan administrasi khususnya dalam menjalankan program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan sebuah program dari pemerintah secara maksimal walaupun ditengah terjadinya pandemi. dan bagaimana tujuan dari program ini dapat dicapai dengan baik.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam program padat karya tunai desa pada masa pandemic Covid-19 di desa Selutung, kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan padat karya tunai desa pada masa pandemic Covid-19 di desa Selutung, kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam program padat karya tunai desa pada masa pandemic Covid-19 di desa Selutung, kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bertujuan dalam menambah referensi atau informasi mengenai kapasitas pemerintah desa dalam program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemic Covid-19 di desa Selutung, kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pencegahan dan penanganan dampak dari sebuah peristiwa ataupun pandemi

yang terjadi, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan fungsinya dalam membantu masyarakat desa baik dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan serta pengelolaan keuangan. Seperti dalam pelaksanaan program padat karya tunai desa pada masa pandemic Covid-19 di desa Selutung, kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

#### **E. Literatur Review**

Dari hasil pencarian literature review melalui beberapa jurnal, dan adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Kajian terdahulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu :

Judul jurnal : Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penulis : Ujang Endi Kurnia dan Ni Wayan Widhiasthini

Publikasi : Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, E-ISSN: 2598-6236. Universitas muhamadiyah Tapanuli Selatan

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, yang dilakukan di dua desa yaitu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dari Penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan PKT Desa di kabupaten jembrana sudah berjalan dengan baik, dan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa khususnya dalam pemberdayaan kelompok masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat menganggur maupun setengah menganggur serta mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Namun PKT Desa belum memenuhi kriteria kecukupan dan pemerataan karena kebijakan padat karya tunai belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan penghambat pelaksanaan PKT Desa adalah pemerintah desa yang kesulitan dalam memenuhi kriteria minimal 30%(persen) upah pekerja dari keseluruhan dana kegiatan PKT Desa.

Judul jurnal : Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pedesaan Provinsi Jawa Barat Dan Riau

Penulis : Deni Herdiyana



Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi p-  
Publikasi : ISSN 0216-5287, e-ISSN 2614-5839 Volume 16, Issue 2,  
Juli 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik survei dan diskusi/wawancara mendalam di daerah/desa sampel. Kajian ini mengambil sampel di desa yang masuk kategori Desa Tertinggal (DT) atau Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Riau. Sebagai pembandingan, terdapat desa yang tidak termasuk klasifikasi DT/DST tapi dengan JPM tinggi yang dikunjungi untuk melihat secara langsung implementasi program Padat Karya Tunai. Ditarik kesimpulan bahwa Program PKT tidak dapat dilaksanakan terhadap pedesaan yang sudah mandiri dan maju. Hal ini dikarenakan fasilitas infrastruktur Desa sudah tersedia dan memadai, sehingga tidak efektif apabila program PKT tetap dilaksanakan di Desa mandiri dan maju tersebut. Kemudian Pemerintah Pusat/Daerah telah melakukan sosialisasi sebelum penerapan program PKT. Sosialisasi tersebut telah memberikan kejelasan program secara cukup yang disertai

dengan pedoman yang lengkap. Namun di sebagian kecil Desa sampel, terdapat keluhan akan minimnya pedoman teknis lanjutan terkait pelaksanaan PKT yang belum sesuai dengan kebutuhan.

- Judul jurnal : Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar
- Penulis : Anak Agung Gde Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika.
- Publikasi : Jurnal Administrasi Publik, 4 (2)(2019), 71-82. Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.

Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar. berdasarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan kegiatan sesuai yang disyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT dilaksanakan secara swakelola; pembayaran upah dibayarkan secara tunai (*cash for work*); serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaksana kegiatan swakelola (tenaga kerja lokal); Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi :

kebijakan Pemerintah, kelembagaan Desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi : penyesuaian perencanaan Desa dan skill/keahlian pekerja.

Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marjinal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Pada umumnya, model padat karya tunai digunakan pada wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan/wilayah pasca konflik. Namun tidak menutup kemungkinan, model ini menjadi instrumen dalam penanganan kemiskinan.

Dari ketiga penelitian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada seberapa efektif pelaksanaan PKT Desa meskipun diterapkan di desa yang sudah maju dan mandiri, dan di desa miskin serta bagaimana program PKT Desa dalam memberdayakan masyarakat, dan juga pembangunan infrastruktur desa. Berbeda dengan ketiga penelitian diatas, peneliti akan menggunakan salah satu dari 5 perspektif ilmu pemerintahan yaitu *governability*, perspektif ini akan menjelaskan lebih dalam bagaimana kapasitas pemerintah dalam menjalankan

fungsinya atau tata kelola pemerintah secara politik (kebijakan, *authonomy and devolution of power*) ekonomi dan administrasi khususnya dalam menjalankan program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan sebuah program dari pemerintah secara maksimal walaupun ditengah terjadinya pandemi.dan bagaimana tujuan dari program ini dapat dicapai dengan baik.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemerintah Desa**

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governingcommunity*) dengan pemerintahan lokal (*local selfgovernment*). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah Desa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan

Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum (Umamur Dekki Ra'is, 2017). Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa. Hal ini mendorong lebih banyaknya Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan atau program yang ada di desa atau dalam dalam setiap pengambilan keputusan Kepala desa.

Setiap pemerintah tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut desa memiliki susunan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi

- a) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat Desa. Yang terdiri dari sekretaris desa, Kepala urusan tata usaha dan umum, Kepala urusan keuangan, Kepala urusan perencanaan, Kepala seksi pemerintahan, Kepala seksi kesejahteraan, Kepala seksi pelayanan. Kepala kewilayahan atau Kepala dusun.

- b) Susunan organisasi tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Susunan organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

2. Kedudukan, tugas dan kewajiban Kepala desa.

Tugas dan kewajiban Kepala desa adalah: Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rencana peraturan Desa bersama BPD dan menetapkan sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang ada di Desa.

### 3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Desa, yang terdiri atas urusan-urusan. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

### 4. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa. Membantu dalam pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan terdiri dari Kepala urusan Tata usaha dan umum, Kepala urusan perencanaan, dan Kepala urusan keuangan.

### 5. Kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis, membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Kepala seksi terdiri atas Kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.

#### 6. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun setempat.

## 2. Kapasitas Pemerintah Desa

Penelitian ini menggunakan perspektif *governability*, yang dimana menurut Pratikno dan Cornelis Lay *Governability* adalah kapasitas pemerintah untuk mengelola dan menyediakan barang-barang politik (*political goods*), dalam terminologi politik *political goods* adalah keamanan, pelayanan publik, tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi antar masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, kesempatan ekonomi, dan lingkungan bisnis yang kondusif, dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat (Pratikno dan Lay, 2007:4). Dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam bertindak agar dapat mengelola dan menyediakan barang-barang politik untuk kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan kapasitas menurut (Haryanto, 2014:14) merupakan sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap

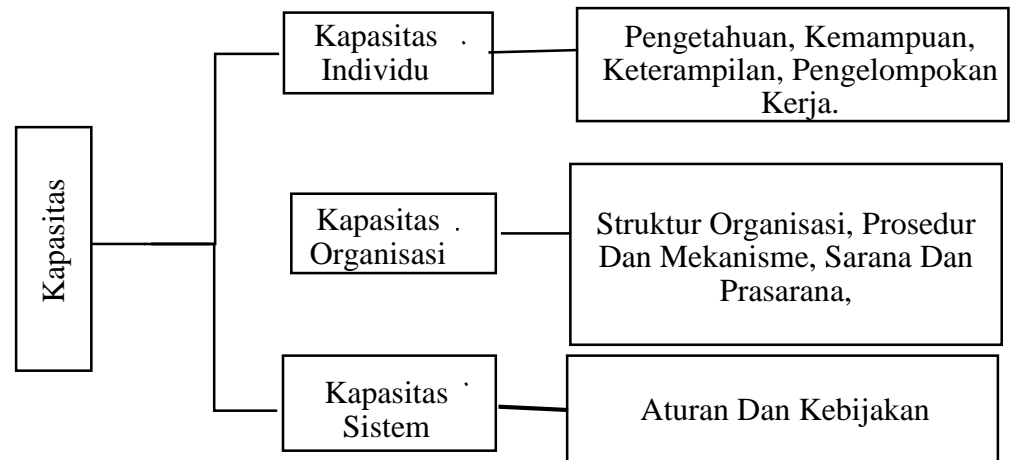
individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu rangka mencapai tujuan.

Berdasarkan tingkatannya dalam (Sulistia, 2015) kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Tingkatan individu, contohnya pengetahuan, keterampilan tingkah laku pengelompokan pekerjaan dan organisasi.
- b. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
- c. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan.



Gambar 1.1  
Tingkatan Kapasitas



Dari bentuk dan tingkatan kapasitas pemerintah desa diatas, yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tentang kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Selutung adalah kapasitas berdasarkan tingkatannya. Kapasitas berdasarkan tingkatan di atas dapat menggambarkan bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemic Covid-19.

- a. Pada tingkatan individu : Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui non

formal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu dari aparat desa ataupun para pekerja pelaksanaan PKT desa.

- b. Pada tingkatan organisasi : Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Dengan demikian PKT desa akan terlaksana dengan baik dan tepat jika pemerintah desa dapat menciptakan sistem pelaksanaan yang tepat dalam organisasi pemerintahan sendiri maupun pihak pelaksana PKT desa yang diluar dari pemerintah desa.
- c. Pada tingkatan sistem : Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut. Tentunya pelaksanaan PKT Desa memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan PKT desa yang diatur dalam peraturan desa dan hal tersebut tentunya dapat diketahui jelas oleh seluruh masyarakat desa agar pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

### 3. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Virus korona baru awalnya disimbolkan *2019-nCoV* oleh WHO, dengan huruf *n* yang berarti novel atau baru, dan *CoV* yang berarti coronavirus atau virus korona. Virus ini tergolong dalam ordo Nidovirales, keluarga *Coronaviridae*, dan genus Betacoronavirus (Beta-CoV). Genus *betacoronavirus* terdiri atas empat garis keturunan (subgenus), di mana *2019-nCoV* bersama dengan *SARS-CoV* digolongkan dalam garis keturunan B (*subgenus Sarbecovirus*). Virus *2019-nCoV* merupakan spesies ketujuh dalam keluarga *Coronaviridae* yang mampu menginfeksi manusia, selain *229E*, *NL63*, *OC43*, *HKU1*, *MERS-CoV*, dan *SARS-CoV*. Pada 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) memberi nama virus ini *coronavirus sindrom pernapasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*, (*SARS-CoV-2*) yang merupakan galur dalam spesies *SARS-CoV*.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit\\_koronavirus\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019)).

Awal mula penyebaran novel korona jenis baru berasal dari kombinasi virus korona yang menginfeksi beberapa hewan seperti kelelawar dan ular, virus ini berpotensi menginfeksi manusia dan menyebabkan gangguan pernapasan akut pada manusia, penyebaran virus ini sangatlah cepat. Baik itu menyebar melalui udara dan dengan sentuhan langsung antara manusia.

Novel korona jenis baru ini ditetapkan sebagai penyakit pandemi. Penyakit pandemi merupakan wabah yang menyebar secara meluas pada waktu yang bersamaan, dan terjadi pada sejumlah besar kawasan. Wabah ini dalam waktu yang singkat akan menyebar luas lintas negara. Hingga saat ini seluruh negara di dunia terdampak virus korona, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini peranan desa perlu dikerahkan sepenuhnya dan diberdayakan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus yang muncul. Dengan itu pemerintah telah menginstruksikan menggunakan Dana Desa untuk mengedukasi masyarakat di desa dalam hal penanganan kasus Covid-19. Bahkan, dan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Artinya, di dalam pelaksanaan desa tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa ini dengan menggunakan dana desa.

Tujuan dari kebijakan ini untuk membantu desa menangani untuk mengurangi penularan virus Corona. Dengan menggunakan dana desa, dapat memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penularan terjadi dengan cepat sebab social distancing tidak diindahkan oleh masyarakat. Imbauan serta arahan pemerintah harus terus

digaungkan untuk meminta kepada masyarakat mengikuti arahan pemerintah dan tidak melanggarnya. Dengan adanya surat edaran di atas, memberikan sedikit harapan untuk desa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 dengan harapan dana yang dikelola desa dapat dimanfaatkan dengan cerdas dan bijaksana. Dan kita berharap wabah ini segera berakhir dan kita kembali dapat menata hidup yang normal dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.

#### **4. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)**

Dalam tulisan Adib (2020) yang dimaksud dengan Padat Karya Tunai Desa (*Cash Of Work*) merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang banyak digunakan di negara-negara dunia, khususnya negara kategori miskin dan berkembang. Program ini dijalankan melalui kerjasama antara pemerintah setempat dengan NGO (*Non Government Organization*) baik dalam negeri maupun internasional. Skema *cash for work* ini mulai dikenal di era 1900-an yang diimplementasikan dalam jangka pendek (*short term*) sebagai sebuah program yang bersifat sementara waktu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pasca peristiwa darurat seperti bencana atau konflik yang terjadi untuk melindungi rumah tangga miskin dari kehilangan pekerjaan sementara, termasuk mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia guna mendukung percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan Presiden menugaskan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) di seluruh desa. Untuk memfokuskan program pembangunan desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/ miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Padat Karya Tunai adalah skema baru dalam pengalokasian dana desa. Prioritasnya untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat (SKB-4 Menteri, 2017).

Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didasari oleh upaya pemberdayaan masyarakat desa khususnya kelompok masyarakat marjinal. Kebijakan ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan di Desa, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di Desa. Konsep yang dibuat pemerintah desa dalam

mengimplementasikan program padat karya tunai desa ini tentunya harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat di setiap program yang dijalankan pemerintah desa sehingga tugas pemberdayaan masyarakat desa pun ikut terlaksanakan.

Pelaksanaan PKT desa pada masa pandemi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Yaitu:

- a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- b. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- c. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- d. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- e. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
- f. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

- 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
- 2) restoran dan wisata Desa
- 3) perdagangan logistik pangan
- 4) perikanan
- 5) peternakan
- 6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

Dari penjelasan pelaksanaan PKT Desa diatas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pembangunan tetap dapat dilaksanakan pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan, dan kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat untuk tetap mendapatkan pekerjaan serta penghasilan.

Dewasa ini Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;



2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dari 5 prioritas penggunaan dana desa diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa berfokus pada program kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, salah satunya yaitu Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dengan melibatkan tenaga dari masyarakat dan memanfaatkan sumber daya desa di dalamnya. Dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga manfaat kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa. Dengan demikian program PKT desa ini adalah program yang dilaksanakan melalui dana desa, memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, dan hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat desa.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Kapasitas individu yang dimiliki oleh pemerintah desa Selutung dalam pelaksanaan program PKT Desa.
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki oleh pemerintah desa Selutung dalam pelaksanaan program PKT Desa
3. Kapasitas sistem yang dimiliki oleh pemerintah desa Selutung dalam pelaksanaan program PKT Desa.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Moleong (2005:6). Dan dalam penelitian ini data yang akan digali bersumber dari pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu pemerintah desa setempat, dan

masyarakat desa maupun dari dokumen-dokumen desa terkait dengan pelaksanaan PKT Desa di desa Selutung.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Dalam (Suryani:2015) dijelaskan bahwa penelitian eksploratif digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah topik atau masalahnya sebelumnya belum menjelaskan secara baik pada penelitian terdahulu, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena dalam sebuah situasi, dan mengerti apa yang terjadi sebelum membangun sebuah model penelitian yang lebih komprehensif. Dengan demikian penelitian ini akan lebih menggali lebih dalam tentang informasi terkait dengan terjadinya sebuah fenomena baru yang terjadi di Indonesia yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sistem sosial masyarakat maupun pemerintahan Desa khususnya dalam program Padat Karya Tunai Desa di desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Bulan Mei 2022.

### **3. Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian atau dapat juga diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti, agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga, unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya (Sudrajat, 2021). Unit-unit analisis diatas dijelaskan oleh (Noto Atmodjo:2005 dalam Sudrajat:2021), sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini maka unit analisis yang digunakan adalah Unit analisis berupa manusia dapat berarti manusia sebagai individu, keluarga, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil unit analisis Pemerintah desa Selutung dan masyarakat Desa Selutung sebagai individu yang akan menjadi informan dari penelitian ini, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Untuk lebih jelasnya dalam unit analisis manusia penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

1.1 Data Informan

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Desa Selutung	1
2.	Perangkat desa	4
3.	Lembaga masyarakat	1
4.	Kepala tukang dan pekerja PKTD	3
	Jumlah	9

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

#### 4. Teknik Pemilihan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar mengetahui informasi yang jelas dan benar, terkait dengankapasitas pemerintah desa dalam program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemi Covid-19. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa, seperti Kepala Kewilayahan, Kepala Urusan, dan terutama Kepala Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan padat karya tunai desa pada masa pandemi Covid-19.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Menurut Lofland (1984) dalam (Meleong, 2013) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada masa pandemi Covid-19. Yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemerintah desa Selutung, pekerja serta masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang tepat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah Desa dalam program Padat Karya Tunai Desa pada masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui informasi tersebut peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Berapa dana desa yang dialokasikan untuk pelaksanaan Padat Karya Desa ?
- 2) Program pembangunan apa saja yang terlaksana pada masa pandemi Covid-19 melalui program PKTD?
- 3) Apakah ada perbedaan pengalokasian dana desa sejak masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi? Tolong dijelaskan!

- 4) Bagaimana teknis pelaksanaan PKTD pada masa pandemi COVID-19?
- 5) Bagaimana perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan PKTD?
- 6) Apakah kendala dalam pelaksanaan program PKTD pada masa pandemi Covid-19?
- 7) Apakah terdapat regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan dan diatur dalam peraturan desa oleh pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan PKTD?
- 8) Bagaimana pemerintah desa memilih masyarakat desa yang dapat berpartisipasi dalam program PKTD agar manfaatnya tepat sasaran sesuai dengan sasaran program PKTD?
- 9) Bagaimana proses pengajuan aspirasi kepada pemerintah terkait dengan prioritas pembangunan dalam program Padat Karya Tunai desa (PKTD)?
- 10) Bagaimana kejelasan pemerintah desa dalam menjelaskan Pelaksanaan program PKTD?
- 11) Apa keahlian yang dimiliki dan berapa lama pengalaman anda bekerja dibidang ini (pekerja atau tukang)?
- 12) Apa saja tugas dan peran perempuan yang mengikuti pengerjaan pembangunan di desa?
- 13) Bagaimana sistem pembagian upah dan berapa upah yang didapatkan saat bekerja PKTD?
- 14) Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah selama bekerja?
- 15) Apa Saja manfaat yang didapatkan sejak adanya program PKTD terutama dalam keadaan pandemi?

Hasil dari wawancara ini akan menjadi sumber data dari peneliti, yang akan diolah dan dipaparkan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemerintah desa Selutung perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan serta penerima manfaat PKTD pada masa pandemi Covid-19. Data yang diambil dapat berupa Profil Desa Selutung, Anggaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Perencanaan Dan Belanja Desa (APBDDes).

**6. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh ialah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian.



a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek dalam kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di Desa Selutung contohnya melakukan pengamatan disaat kegiatan PKT Desa dilaksanakan serta mengamati bagaimana kinerja pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan PKT desa.

Aspek-aspek yang akan diamati dari observasi ini adalah bagaimana kegiatan PKTD dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dan tindakan tindakan yang pemerintah desa dalam pelaksanaan PKTD pada masa pandemi Covid-19. Dan pengamatan ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan aparat atau pemerintah setempat dalam bentuk wawancara, ataupun dengan turun langsung kelapangan, observasi ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan beberapa permasalahan dibawah;

- 1) Partisipasi masyarakat dalam program PKTD
- 2) Kendala administrasi dan teknis pelaksanaan PKTD
- 3) Manajemen pelaksanaan pembangunan di desa dari program PKTD
- 4) Mobilisasi Sumber Daya
- 5) Kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan PKTD

Observasi ini dilakukan pada bulan Desember 2021. Yang dilakukan di desa Selutung, kecamatan Mandor, kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Observasi *pertama* dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 dimana sasaran dari observasi ini adalah untuk melihat bagaimana proses pengerjaan bangunan yang ada di desa, seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, dan pembangunan WC umum khususnya di dusun Kemenyan. Dalam hal ini peneliti memperhatikan bagaimana proses sebuah bangunan yang dikerjakan, jalanan yang dibangun adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk menempuh pertanian ataupun perkebunan mereka. Jalan yang dibangun membantu masyarakat untuk menjangkau tempat perkebunan dengan mudah. Kemudian jalan yang berbentuk rabat beton ini juga dibangun untuk menghubungkan perumahan yang satu dengan perumahan yang lain yang sebelumnya belum memiliki akses jalan yang layak. Kemudian pembangunan WC umum dilakukan agar tatanan dan lingkungan desa lebih rapi dan bersih. Pada masa pandemi Covid-19 proses pembangunan dikerjakan oleh masyarakat desa baik itu kaum pemuda sampai pada orang dewasa.

Observasi *kedua* dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 yang menjadi sasaran dari observasi ini adalah pemerintah desa itu sendiri, dimana disini proses perekrutan tenaga kerja dilakukan oleh kepala dusun dengan mengajak pemuda untuk ikut serta, serta menawarkan pekerjaan

juga kepada Kaum perempuan atau Ibu-ibu yang sedang berkumpul pada salah satu rumah warga desa. Dari hal ini diketahui bahwa masyarakat dibebaskan berpartisipasi dalam program PKT Desa.

Observasi yang *ketiga* dilakukan pada tanggal 17 Desember 2022 dimana peneliti melakukan pengamatan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan desa, termasuk laporan tentang pembangunan di desa. Pelaporan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan dimana data yang diambil adalah hasil pengeluaran ataupun pendapatan desa. Termasuk belanja bahan dan alat pembangunan, serta dana yang diterima oleh masyarakat desa dalam bentuk HOK (Harian Orang Kerja). Kemudian laporan tersebut diakumulasikan dalam Sistem Keuangan Desa (SISKUDES). Kemudian nantinya akan dilaporkan pada Pemdes Kabupaten Landak. Laporan keuangan ini menjadi salah satu syarat penting untuk desa dapat menerima Dana Desa untuk kedepannya.

Observasi *keempat* dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022, dalam observasi ini yang menjadi sasaran adalah pemerintah desa. Peneliti melakukan pengamatan saat dilakukannya Musyawarah Desa. Diadakannya musyawarah desa ini adalah untuk membahas penggunaan Dana Desa, khususnya untuk pembagian BLTDD, yaitu penentuan jumlah masyarakat yang menerima bantuan dan masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan tersebut dikarenakan berpindah tempat tinggal ataupun yang sudah meninggal dunia. Dalam musyawarah ini

para perwakilan wilayah yaitu kepala dusun, dan juga ketua RT melaporkan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat desa pada masing-masing wilayah. Dan melaporkan apa yang masyarakat keluhkan atau perlukan pada masa pandemi Covid-19. Dalam musyawarah ini juga didampingi oleh salah satu narasumber Perwakilan dari kecamatan Mandor yang akan membantu masyarakat dan pemerintah desa bila mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan ataupun kurang mengerti mengenai satu dan lain hal. Dan pada akhir musyawarah pemerintah desa akan melaporkan kembali hasil dari musyaarah desa tersebut dan disetujui oleh seluruh peserta musyawarah desa.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data atau informasi dengan berkomunikasi dimana komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana definisi wawancara yang dikemukakan oleh Moleong, (2010:186) bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara: (1) peneliti

bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opininya mengenai peristiwa yang ada; (2) terfokus (responden diwawancarai dalam waktu singkat; dan (3) terstruktur (dimana peneliti selaku instrumen utama aktif memberikan pertanyaan dan menanggapi setiap jawaban yang diberikan). Proses wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah tersedia.

Tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan PKT Desa oleh pemerintahan di Desa Selutung pada masa pandemi Covid-19.

Wawancara *pertama* dilakukan pada tanggal 27 April 2022 wawancara ini dilakukan di kantor desa Selutung, peneliti mengambil kesempatan untuk melakukan wawancara kepada beberapa aparat desa yang hadir di kantor desa Selutung. Pada waktu wawancara ini dilakukan dengan cukup lancar karena aparat bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti serta memberi jawaban-jawaban atas pertanyaan peneliti dengan baik. Wawancara ini dilakukan bersama kepala dusun Selutung, Ketua RT 02 dusun Kemenyan, ketua RT 01 Dusun Selutung, Serta anggota BPD dari dusun Selutung. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat perekam dan buku catatan sebagai instrumen penelitian.

Wawancara *kedua* dilakukan pada tanggal 29 april 2022, wawancara ini yang menjadi narasumber adalah kepala Desa Selutung. Dimana pada

waktu itu beliau mampir di salah satu warga, dan kebetulan peneliti juga berada di rumah tersebut. Dalam kesempatan ini peneliti menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan peneliti adalah meminta izin terlebih dahulu untuk dapat melakukan wawancara, dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan program PKTD, dan pembangunan Desa, wawancara berlangsung dengan melakukan komunikasi antara peneliti dan beberapa masyarakat yang juga ada di tempat tersebut, artinya wawancara tidak dilakukan secara formal dan kaku, melainkan kepala desa Selutung menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan PKTD desa Selutung dan pemerintahan desa pada waktu pandemi Covid-19. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang cukup jelas dari penjelasan tersebut. Untuk tambahan informasi apabila kedepannya dibutuhkan oleh peneliti kepala desa mengatakan bahwa peneliti dapat menghubungi beliau melalui via aplikasi *Whatsapp*.

Wawancara *ketiga* dilakukan pada tanggal 30 April 2022 bersama Kepala Urusan Keuangan. Dimana peneliti sebelumnya sudah meminta izin untuk melakukan wawancara pada tanggal 30 April 2022, di kediaman Kaur keuangan Desa Selutung, di Dusun Kemenyan. Dalam wawancara ini Kaur Keuangan desa selutunng membagikan informasi yang cukup banyak, bahkan beliau bersedia memperlihatkan bagaimana proses penganggaran dana desa pada masa Pandemi Covid-19.

Wawancara *keempat* dilakukan pada tanggal 1 mei 2022 dimana peneliti

melakukan wawancara bersama kepala tukang dan beberapa pekerja yang pada saat itu sedang berkumpul pada salah satu toko warga Desa Selutung. Peneliti kembali melakukan wawancara yang tidak terlalu kentara, artinya wawancara dilakukan dengan berkomunikasi seperti biasa, tetapi peneliti tetap menggunakan perekam dan buku catatan sebagai instrumen penelitian. Dan pada hari cuaca cukup buruk hujan turun sehingga pada saat pengambilan gambar, sebagai dokumentasi dilakukan apa adanya, sampai ada informan yang tidak menggunakan baju. Peneliti memyarankan untuk menggunakan baju terlebih dahulu tetapi informan tersebut mengatakan bahwa tidak masalah mengambil foto dengan keadaan seperti ini. Dan peneliti juga mengambil beberapa foto dari beberapa masyarakat yang bersedia menjadi informan di rumah tersebut.

Wawancara *kelima* dilakukan pada tanggal 2 Mei 2022 dengan peneliti datang ke beberapa rumah masyarakat yang pernah berpengalaman dengan berpartisipasi pada pembangunan desa Selutung. Peneliti melakukan wawancara dari siang hari sampai pada malam hari. Dan masyarakat tersebut bersedia untuk diwawancarai karena pada saat itu peneliti harus menunggu kepala keluarga yang belum datang bekerja.

#### d. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam menuliskan hasil penelitian diperlukan sejumlah dokumen sebagai sumber data yang mendukung penelitian. Oleh

karena itu, studi dokumentasi sangat diperlukan dalam penelitian. Danial dan Wasriah (2009: 79) mengemukakan: Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan lainnya.

Dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2010: 161). Teknik ini digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan suatu objek maupun keadaan. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat, menganalisa data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dan menunjang penelitian.

Dengan demikian studi dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan lainnya. Contohnya profil desa, data APBD, RPJMDes, dan dokumen desa lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PKT. Dokumen yang tersedia adalah file PDF, word, excel, dan peneliti mengambil beberapa foto hasil dari program PKTD. Serta setiap melakukan wawancara peneliti menambil



foto bersama para informan.

## **7. Teknik Validasi Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan data menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya. Dalam paradigma kualitatif untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Meliputi:

### **a. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti dalam penjarangan data menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Karena jika seorang peneliti berada dilapangan penelitian maka tingkat validitas data tersebut adalah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti ikut serta turun kelapangan untuk melihat bagaimana proses suatu pembangunan dari program PKTD dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

### **b. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan (Moleong, 1990: 178). Peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam

penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Progran Padat Karya Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selutung. Baik itu dari data hasil wawancara maupun data dokumen-dokumen yang ada.

## **8. Metode Analisis Data**

Menurut Patton (1986:268), pembahasan atau analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Pembahasan atau analisis permasalahan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi data dan telaah pustaka mencakup uraian masalah secara rinci, alternatif model dan pemecahan masalah secara runtut. Pembahasan harus memuat analisis data, dan interpretasi, yang merupakan jawaban rinci atas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian secara proporsional. Pembahasan mengenai hal-hal yang bersifat teoritis yang sebagian besar diperoleh dari hasil telaah pustaka ditempatkan pada permulaan penguraian masalah. Data beserta analisisnya yang diperoleh melalui penelitian dibahas setelah itu.

Dalam proses analisis data, Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008) bahwa teknik analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Collecting* data (pengumpulan data) yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang begitu banyak.
- b. *Data Reduction* (Pemilihan data), yaitu semua data yang dikumpulkan dipilih dan dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan dalam penelitian.
- c. *Data Display* (penampilan data), yaitu penulis menyajikan data dalam bentuk laporan secara sistematis dan mudah, dibaca serta dipahami.
- d. *Conclusion* (menarik kesimpulan), berdasarkan data relevan yang dikumpulkan dan ditampilkan tersebut, kemudian ditarik satu kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir penelitian.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA SELUTUNG**

#### **A. Sejarah Desa**

Riwayat terbentuknya Desa Selutung adalah pada awalnya kampung Selutung ini merupakan sebuah kampung yang terletak di hamparan hutan pegunungan, nenek moyangnya adalah penduduk setempat dari asal mula kampung tembawang lama yang membuat ladang berpindah-pindah, di pimpin seorang Kepala Kampung ( Kabayan ) tanpa gaji cuma penghargaan dari, berupa iuran beras per Kepala keluarga, satu gantang setahun sekali. Desa Selutung terjadi atas (Regrouping Desa) pembentukan Desa pada tahun 1991, terdiri dari 2 dusun, yaitu : Dusun Selutung dan Dusun Kemenyan. Kini Desa Selutung sudah mulai ada kemajuan Akses jalan penghubung antar dusun sudah di bangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak, pembangunan di Desa Selutung berupa infrastruktur, yang berskala dari pemerintah kabupaten maupun provinsi belum merata.

#### **B. Kondisi Geografis Desa**

Desa Selutung adalah salah satu Desa yang ada diwilayah kecamatan Mandor, kabupaten landak, provinsi kalimantan barat, dengan pusat pemerintahan di desa Selutung. Luas wilayah Desa Selutung adalah 34,56 Km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Selutung berbatasan langsung dengan Desa-Desa di kecamatan

Mandor, kabupaten landak. Adapun batas-batas Desa Selutung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Desa Lamoanak

Sebelah Selatan :Desa Kerohok Dan Kayuara

Sebelah Timur : Desa Bebatung

Sebelah Barat :Desa Lamoanak/ Mandor

### **C. Demografi Desa**

#### **1. Data Penduduk**

Tahun 2020 Desa Selutung memiliki penduduk sebanyak 898 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 475, penduduk perempuan 423 jiwa yang terbagi dalam 246 Kepala Keluarga, diantaranya terdiri dari 83 penduduk kurang mampu. Rincian penduduk sebagai berikut : Dusun Selutung Laki-laki 241 Jiwa, Perempuan 207 jiwa, Dusun Kemenyan Laki-laki 234 Jiwa Perempuan 216 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Selutung.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	laki-laki	475	52,9
2.	Perempuan	423	47,1
Jumlah total		898	100

*Sumber: Profil Desa Selutung 2020*

Berdasarkan data tabel 2.1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Desa Selutung mayoritas (52,9%) adalah laki-laki sedangkan jumlah perempuan sebanyak 47,1%. Persebaran penduduk di Desa Selutung tersebar di wilayah yang terbagi dalam 2 Dusun, 2 Rukun Warga (RW), Dan 5 Rukun Tetangga (RW). Artinya potensi tenaga kerja yang akan melaksanakan program PKTD dikerjakan oleh kaum laki-laki.

## 2. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Untuk dapat melihat Data demografis penduduk tahun 2020 berdasarkan mata pencapaian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah	Presentase
1	PNS	2	0,2
2	Guru Swasta	4	0,6
3	ABRI/POLRI	1	0.1
4	Swasta	244	27,2
5	Wiraswasta	37	4,1
6	Petani	314	35
7	Pedagang	27	3
8	Buruh tani	119	13,3
9	Belum bekerja	148	16,5
Jumlah		898	100

*Sumber: profil Desa Selutung 2020*

Dari tabel 2.2 di atas dapat kita lihat bahwa profesi yang terbesar adalah petani dengan jumlah 35%, hal ini menunjukkan mata pencaharian secara mayoritas di Desa Selutung adalah petani, diikuti dengan pekerjaan swasta yang juga banyak di Desa Selutung sebesar 27,2%, hasil observasi juga menunjukkan pekerjaan juga lebih bervariasi, seperti ada yang merangkap pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Jika diperhatikan dari data dan dengan kondisi di lapangan sendiri perekonomian di Desa Selutung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan lebih banyak jumlah yang memiliki pekerjaan daripada jumlah penduduk yang belum bekerja. Dengan demikian berkurangnya masyarakat yang tidak bekerja juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

dengan penduduk yang rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung mata pencaharian yang dimiliki masyarakat maka dari tabel tersebut dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini melalui program PKT Desa. Seperti membangun jembatan, jalan rabat beton untuk menuju lahan pertanian dan sebagainya. Dengan demikian selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas pertanian maka, program pkt tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada.

### 3. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Selutung Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3  
Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Selutung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum tamat SD	179	20
2	Sekolah Dasar/Sederajat	513	57,1
3	Sekolah Menengah Pertama	118	13,1
4	Sekolah Menengah Atas	69	7,7
5	Akademi/D1-D3	9	1
6	Sarjana	10	1,1
	Jumlah	898	100

*Sumber: Profil Desa Selutung 2020*

Dapat dilihat dari tabel 2.3 di atas bahwa tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Selutung masih didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar yakni dengan jumlah 57,1%. selisih antara jumlah keseluruhan penduduk dengan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata penduduk memiliki pendidikan dasar sedangkan dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) hingga sarjana masih kurang, sehingga di Desa Selutung dilihat dari pekerjaan yang dimiliki lebih dominan sebagai

petani, yang diakibatkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan di Desa Selutung.

Berkaitan dengan penelitian ini rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat akan berpengaruh pada pekerjaan dan perekonomian masyarakat, dari data tersebut pemerintah Desa dapat mengadakan pembangunan yang dapat mendukung program pendidikan apa di Desa Selutung. Seperti merencanakan pembangunan paud Desa, perbaikan akses jalan menuju sekolah yang ada.

#### **D. Keadaan Sosial, Ekonomi Dan Budaya**

##### **1. Keadaan Sosial**

Suku yang mendiami Desa Selutung merupakan mayoritas adalah suku Dayak dengan pola kehidupan sosial satu kesatuan adat. Suku Dayak memiliki sistem kepercayaan keagamaan yang diakui pemerintah. Kultur bertani dengan pola aliran (gotong royong menggarap ladang) pola dominan yang masih dilakukan oleh penduduk. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul diselesaikan melalui ui jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah mufakat. Disamping itu, hubungan kekerabatan dan keterkaitan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu membantu baik dalam hal kesusahan maupun dalam rasa bersyukur seperti “baroah” atau gawai padi yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar suku dayak maupun

peringatan lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Adapun organisasi tersebut yaitu: Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Adat, BUMDES, Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (FKPM)

Lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Selutung yang berfungsi sebagai salah satu lembaga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. LKMD di Desa Selutung sudah berjalan dengan aktif, hal ini dibuktikan dengan tersedianya kantor LKMD yang ada di kantor Desa Selutung. Karang taruna sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa Selutung. Karang taruna yang ada di Desa Selutung sejauh ini belum berjalan dengan efektif, karena masih kurangnya pembinaan dari setiap dusun maupun dari Desa dalam rangka merencanakan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan. PKK merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah Desa yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan. Kegiatan PKK di Desa Selutung masih belum berjalan

dengan efektif hal ini dikarenakan setiap dusun PKK hanya melaksanakan kegiatan Posyandu dan tidak memiliki program yang menjadi rutinitas setiap dusun. Lembaga Adat merupakan suatu organisasi yang berkedudukan di suatu wilayah kekuasaan tertentu. Lembaga adat di Desa Selutung keberadaan dan kegiatannya berjalan dengan efektif dapat dilihat dari peran pengurus adat yang senantiasa mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di wilayah lembaga adat Selutung. BUMDES adalah badan usaha milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berbadan hukum. BUMDES di Desa Selutung masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih pengelolaan bumdes yang dilaksanakan maksimal oleh pengelola BUMDES, sehingga program-program yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan maksimal.

## 2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk dapat dilihat dari persentase pekerjaan yang pada umumnya petani. Pekerjaan petani masih merupakan dominasi utama, hasil pertanian baru cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, gerakan melalui 4 (empat) modernisasi pertanian belum sepenuhnya dapat diterapkan pada pertanian. Perkebunan karet rakyat sebagian kecil dimiliki oleh penduduk sebagai hasil komoditas, hasil ini belum dapat meningkatkan pendapatan penduduk dengan baik. Usaha masyarakat di bidang perniagaan juga masih didominasi oleh pengusaha kecil dengan

modal yang rendah. Sistem pekerasian belum menjadi pola ekonomi masyarakat. Penghasilan rata-rata penduduk tahun 2020 berkisar antara Rp3.000,- sampai dengan Rp5.000,- per hari, atau Rp1.500.000 per-bulan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Selutung masih dikatakan rendah.

### 3. Kondisi Budaya

Gotong royong masih dilakukan masyarakat dalam mengerjakan sawah (*aleant*), mendirikan rumah, pesta pernikahan, membantu warga pada saat terjadi musibah. Kerja sama dalam kegotong-royongan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang sifatnya umum seperti membangun jembatan, saluran irigasi atau parit pembuangan, dan mendirikan tempat ibadah. Hal ini juga dilakukan dengan pengerjaan PKTD, masyarakat melakukan pembangunan dengan gotong royong. Dan masyarakat biasanya jika ada kegiatan di desa baik itu pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan bersih-bersih desa menamakan kegiatan itu sebagai (*Royong*).

## **E. Sarana Dan Prasarana**

### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian dan moral manusia untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 c

ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Untuk menunjang dan menindaklanjuti hal tersebut maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan.

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan walaupun belum bisa memenuhi sarana dengan semestinya.

Prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Selutung adalah satu unit gedung SD dan satu unit gedung PAUD. Sarana pendidikan sekolah dasar di Desa Selutung Merupakan Sekolah Dasar Negeri 23 Selutung sebanyak 1 Unit dengan tenaga pengajar sebanyak 5 orang, 4 orang diantaranya PNS dan 1 orang tenaga pengajar honorer dengan dibayarkan melalui dana BOS dengan jumlah siswa sebanyak 82 siswa. Sedangkan untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) sendiri belum ada data yang tertulis karena seperti yang diketahui selama observasi yang dilakukan serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa gedung PAUD serta tenaga pengajar baru tersedia pada tahun 2021 akhir, dan belum ada kegiatan belajar yang belum dilaksanakan, karena masih dalam tahap perencanaan dan persiapan, sedangkan fasilitas pendidikan seperti alat bermain anak-anak, serta perpustakaan sebagai penunjang proses belajar anak belum memadai. Serta di Desa Selutung belum tersedia gedung untuk menunjang proses belajar mengajar untuk para siswa SMP dan SMA, sehingga

mereka harus melanjutkan pendidikan luar wilayah Desa seperti di kecamatan tepatnya di kecamatan Mandor. Dengan jarak tempuh antara desa dan sekolah yang cukup jauh membuat anak-anak di desa enggan untuk melanjutkan pendidikan, dan lebih memilih untuk langsung bekerja dan mendapatkan uang. Sehingga Tenaga kerja yang berpartisipasi dalam PKTD adalah masyarakat yang mayoritas adalah lulusan SD.

## 2. Perhubungan

Transportasi masyarakat Desa Selutung pada umumnya menggunakan jalan penghubung antar kecamatan berupa jalan aspal dan sebagian jalan telford berupa pengerasan, sedangkan jalan antar dusun berupa jalan lapen dan rabat beton. Fasilitas kendaraan berupa mobil (roda empat) sepeda motor dan sepeda manual. Oleh sebab itu dalam pengangkutan alat dan barang bangunan dalam program PKTD cukup mudah dilakukan dengan akses jalan yang memadai.

## 3. Komunikasi

Sistem komunikasi jarak jauh di Desa Selutung telah memanfaatkan teknologi informasi berupa, televisi dan radio, dan handpone. Hal ini telah dapat memperlancar komunikasi masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang ada masyarakat lebih mudah berkomunikasi menggunakan alat elektronik yang ada. Dalam kegiatan pembangunan pemerintah desa dan masyarakat akan lebih mudah berkomunikasi jarak jauh.

#### 4. Penerangan

Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah melalui Desa Selutung, baik Dusun Selutung maupun Dusun Kemenyan sudah teraliri listrik negara sehingga pemanfaatannya sangat dirasakan oleh warga setempat. Namun ada sebagian kecil warga yang belum menggunakan penerangan dari PLN dengan alasan ekonomi kurang mampu. Ada juga warga untuk mendapatkan penerangan dengan mencantol rumah tetangga. Dengan adanya fasilitas ini memudahkan masyarakat dalam kegiatan PKTD, dimana ada beberapa alat bangunan yang memerlukan tenaga listrik dalam pengerjaannya.

#### 5. Sarana dan prasarana kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini akan memiliki dampak positif dan menghasilkan sumber daya yang berpotensi. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, maka dari itu segala bentuk hal yang berguna untuk menjadikan Indonesia sehat adalah dimulai dari membangun sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Selutung.

Pelayanan kesehatan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan melalui program pemerintah yaitu Pelayanan Posyandu untuk anak usia 0 bulan – 59 bulan (0 bulan - 5 tahun), Posbindu (Pos Binaan Terpadu) dan pelayanan Lansia (Lanjut Usia) yang diadakan setiap satu bulan sekali di unit pelayanan yang ada di Desa gedung posyandu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa



kepedulian pada penduduk usia balita dan dan lanjut usia sangat tinggi. Terbukti dari ketersediaan posyandu di setiap dusun yang berjumlah 2 unit. Yang memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

## **F. Struktur Organisasi Desa**

Organisasi pemerintah Desa Selutung terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. Kepala Urusan ini terdiri atas Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Urusan Teknis terdiri atas Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Dalam rangka pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat di tingkat wilayah diangkat Unsur Kewilayahan. Unsur Kewilayahan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur organisasi pemerintah Desa Selutung adalah:

1. Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa, yang membawahi:
  - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum;
  - 2) Kepala urusan keuangan; dan

- 3) Kepala urusan perencanaan.
3. urusan teknis yang terdiri dari:
    - 1) Kepala seksi pemerintahan;
    - 2) Kepala seksi kesejahteraan; dan
    - 3) Kepala seksi pelayanan.
  4. unsur wilayah terdiri dari: 2 (dua) dusun dan 5 staf perangkat Desa

Tabel 2. 7  
Jumlah Perangkat Desa

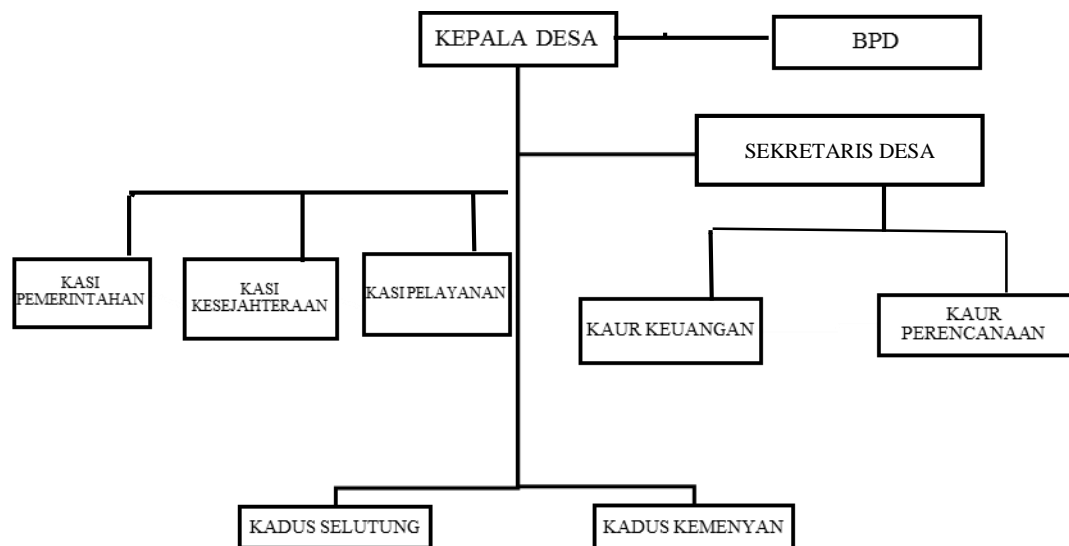
No	Jabatan	Tingkat pendidikan	Jumlah Personil
1	Kepala Desa	SLTA	1
2	Sekretaris Desa	S1	1
3	Kepala Urusan keuangan	S1	1
4	Kepala urusan umum dan perencanaan	D3	1
5	Kepala seksi pemerintahan	S1	1
6	Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan	D3	1
7	Kepala dusun Selutunng	SLTA	1
8	Kepala dusun Kemenyan	SLTP	1
	jumlah		8

*Sumber: profil Desa Selutung 2020*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemerintah Desa didukung oleh perangkat Desa sebanyak 3 orang dan badan permusyawaratan

Desa sebanyak 5 orang. Perangkat Desa diangkat melalui mekanisme penyaringan melalui ujian tertulis yang diselenggarakan oleh panitia pengisian perangkat Desa. Perangkat Desa di Desa Selutung sudah memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata, yaitu sudah menempuh pendidikan D3 dan S1 dengan jumlah 5 perangkat Desa. Hal ini akan menuntut pemerintah Desa untuk berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Berikut ini bagan struktur organisasi pemerintah Desa.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Selutung



Sumber: Profil Desa Selutung 2020

Desa Selutung terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu : Dusun Selutung, Dusun Kemenyan. Masing-masing dusun diKepalai oleh seorang Kepala

Dusun. Berdasarkan Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa tersebut di atas, maka masing-masing kelembagaan tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Bodot
2. Sekretaris Desa : Mardiwis
3. Kepala Urusan Keuangan : Ressay Sagita
4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Robinus, A. Md
5. Kepala Seksi Pemerintah : Bernadus Wandiro, S.Pd.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan : Hendrikus, A.Md
7. Kepala Dusun Selutung : Yulianus Sunarto
8. Kepala Dusun Kemenyan : Hermanto

Sebagai mitra kerja Kepala Desa, juga sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Disamping itu juga ada pengurus-pengurus Kelompok PKK, Kelompok Petani di masing-masing Dusun.

## **G. Visi Dan Misi**

### 1. Visi

“ Terwujudnya Desa Selutung yang Mandiri, Maju dan Sejahtera “

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mandiri, dimana Desa tersebut sudah tersedia Fasilitas Umum dan mempunyai Pendapatan Asli Desa, serta Desa sudah mampu mengembang diri sendiri dan meningkatkan ekonomi Desa.
- b. Maju, dimana Desa sudah mampu mengembangkan diri sendiri dan sudah mampu meningkatkan pendapatan penduduk serta mampu mensejahterakan Desa secara Utuh dan Sukses.
- c. Sejahtera, dimana Desa sudah mampu melihat perkembangan zaman dalam proses pensejahteraan Masyarakat secara Komplek dan mempunyai visioner kedepan lebih membangun manusia seimbangan dengan pembangunan Fisik.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Terukur
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Kesejahteraan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kemandirian Ekonomi
5. Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pembangunan Kembali modal Sosial.

Ditinjau dari visi pemerintah Desa Selutung, terlihat Desa ini lebih berfokus kepada peningkatan Desa yang mandiri, maju dan sejahtera. visi pemerintah Desa sudah terlihat dalam memuat kata-kata penguat ataupun kalimat yang bisa dijadikan poin-poin dalam misi Desa Selutung sehingga memuat kata yang efektif yang singkat jelas dan padat.

Untuk Misi Desa Selutung sesuai dengan tujuan Desa lainnya dan sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat dan Desa, penguatan kualitas sumber daya manusia dan swadaya masyarakat, dan juga pengelolaan sumber daya alam untuk penguatan kemandirian ekonomi Desa, serta menjadikan Desa sebagai pusat pembangunan sosial.

#### **H. Data Aparat Pemerintah Desa**

Aparat Desa di Desa Selutung dipilih dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan bekerja pada bidang dan kemampuannya masing-masing, dari segi pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing aparat, pemerintah Desa Selutung memiliki aparat yang mengenyam pendidikan pada tingkat sd sampai tingkat strata 1 (SD) dan di dominasi oleh aparat lulusan D3. Dengan hanya 1 (satu) anggota perempuan dan 7 (tujuh) anggota laki-laki. Berikut ini data

aparatus Desa yang sedang menjabat pada periode yang masih berlaku pada saat ini.

Tabel 2.8  
Data Aparatus Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Bodot	Kepala Desa	SLTA	L
2	Mardiwis	Sekretaris Desa	S1	L
3	Bernadus Wandiro,A.Md	Kepala Seksi Pemerintahan	S1	L
4	Hendrikus, A.Md	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	D3	L
5	Ressy Sagita, S.Pd	Kepala Urusan Keuangan	S1	P
6	Robinus, A.Md	Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan	D3	L
7	Yulianus Sunarto	Kadus Selutung	SLTP	L
8	Hermanto	Kadus Kemenyan	SLTA	L

Sumber: Profil Desa Selutung 2020

## **I. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa**

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, memiliki tugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan Kepala Desa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.



- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Desa, yang terdiri atas urusan-urusan. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, terdiri atas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah Desa.
- b. Pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksanaan wilayah.
- c. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Desa.
- e. Menjalankan administrasi Desa
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Desa.
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Desa.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, administrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintah Desa.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan.

### 3. Urusan Keuangan

Urusan keuangan merupakan unsur staf sekretaris Desa yang membantu tugas sekretaris Desa dalam urusan administrasi keuangan dan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Desa. Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan

kemampuan Desa. Urusan keuangan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa.
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan Desa.
- e. Menggali sumber pendapatan Desa.
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau sekretaris Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,

urusan keuangan memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rancangan APB Desa.
- b. Pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa.
- c. Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, pelaporan keuangan Desa.
- d. Pelaksanaan pungutan Desa.
- e. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

#### 4. Urusan Tata Usaha Dan Umum

Merupakan staf sekretaris Desa yang membantu sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan. Urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Desa. Urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat.
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah Desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa.
- d. Menyiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan kegiatan pemerintah Desa lain.
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa.
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala atau sekretaris Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat
- c. Pelaksanaan urusan arsip.
- d. Pelaksanaan urusan ekspedisi.
- e. Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat Desa.

- f. Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor.
- g. Pelaksanaan urusan penyiapan rapat.
- h. Pelaksanaan urusan administrasi aset.
- i. Pelaksanaan urusan inventarisasi.
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas.
- k. Pelaksanaan urusan pelayanan umum.

#### 5. Urusan Perencanaan

Merupakan unsur sekretaris Desa yang membantu tugas sekretaris Desa dibidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris Desa.

Urusan perencanaan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan Desa.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja Desa secara rutin dan atau berkala.
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
- d. Melaksanakan musrembang Desa.
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa.

- f. Menyusun rencana kerja pemerintahan Desa.
- g. Melaksanakan fasilitasi administrasi kesekretariatan badan permusyawaratan Desa.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau sekretaris Desa.

Urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.
- b. Penyusunan program kerja pemerintah Desa.
- c. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
- d. Fasilitasi badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.
- e. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program.
- f. Penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun.
- g. Menginventarisasi data dalam rangka perencanaan pembangunan.  
Pelaksanaan fasilitasi administrasi BPD.

#### 6. Seksi Pemerintahan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan

masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris Desa.

Seksi pemerintahan memiliki fungsi:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- d. Memfasilitasi kerjasama pemerintah Desa.
- e. Menyelesaikan perselisihan warga.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Seksi pemerintahan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan.
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan.
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan.
- f. Fasilitasi kerjasama pemerintah Desa.
- g. Penyelesaian perselisihan warga.

## 7. Seksi Kesejahteraan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang kesejahteraan dan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi oleh sekretaris Desa.

Seksi kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Desa.
- b. Mengelola sarana dan prasarana masyarakat Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman masyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Seksi kesejahteraan memiliki fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan Desa.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Desa.
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa.
- d. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman Desa.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.



- f. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai bidang dan tugasnya.

## 8. Seksi Pelayanan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang agama, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan satu pintu, dan kesejahteraan rakyat. Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris Desa.

Seksi pelayanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai, dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pengaktifan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk.

- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- d. Pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan dan kegotongroyongan.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan satu pintu.
- f. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang dan tugasnya.

#### 9. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala kewilayahan yang disebut Kepala Dusun, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris Desa.

Kepala dusun mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Melaksanakan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.

- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pelaksanaan pemerintah Desa. Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa.
- f. Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan.
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala dusun.

## **J. Data Personil BPD**

Berdasarkan data yang ada personil BPD sudah menempuh pendidikan terakhir pada tingkat SLTA, namun yang lebih mendominasi kedudukan di BPD adalah kaum laki-laki yaitu 3 anggota BPD laki-laki dan 2 perempuan. Berikut adalah tabel data personil BPD di Desa Selutung.

Tabel 2.9  
Data Personil BPD

Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, dan Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Adin	Ketua	L	SLTA
2	Regina	Wakil Ketua	P	SLTP
3	Lismanto	Sekretaris	L	SLTA
4	Marselina	Anggota	P	SLTA
5	Gunawan	Anggota	L	SLTP

*Sumber: Profil Desa Selutung 2020*

## K. Lembaga Desa

Berdasarkan tabel 2.10 terdapat beberapa lembaga Desa yang aktif seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Adat, Kelompok Tani, Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan hanya BUMDes yang masih belum aktif kegiatannya sampai saat ini. Lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan anggota dan pengurus masing-masing yang aktif, namun belum sepenuhnya dijalankan secara rutin dan terjadwal.

Tabel 2.10  
Data lembaga Desa

No	Nama Lembaga Desa	Keterangan
1	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Aktif
2	LKMD	Aktif
3	Karang Taruna	Aktif
4	PKK	Aktif
5	Kelompok Tani	Aktif
6	BUMDes	Tidak Aktif
7	Lembaga Adat	Aktif
8	FKKPM	Aktif

*Sumber: Profil Desa Selutung 2020*

#### **L. Prioritas Pembangunan Desa Selutung**

Program Padat Karya Tunai Desa yang adalah sebuah program di desa dengan berfokus pada kegiatan pembangunan fisik di desa. Dalam seluruh program pembangunan yang ada pastinya setiap desa juga memiliki program yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk keperluan dan kepentingan masyarakatnya. Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran belanja desa, kewenangan desa dan secara teknis

di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada di desa. Adapun program dan kegiatan pembangunan di desa Selutung meliputi:

Tabel 2.11  
Prioritas pembangunan desa Selutung

No	Uraian	Lokasi	Volume	Sifat (B,R,L)	Manfaat
1.	Pembangunan Gedung Posyandu	Dsn. Selutung dan Kemenyan	2 unit	B	Memperlancar Transportasi
2.	Pembangunan Gedung PAUD	Dsn. Selutung	2 unit	B	Memperlancar Transportasi
3.	Pembangunan MCK	Dsn. Selutung dan Kemenyan	10 unit	R	Memperlancar Pelayanan Masyarakat
4	Pembangunan Jalan Telfot	Desa Selutung	10.000 meter	B	Memperlancar Pelayanan Masyarakat
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dsn. Selutung dan Kemenyan	10.000 meter	B	Memperlancar Transportasi
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn. Kemenyan	10.000 meter	B	Memperlancar Transportasi
7	Pembangunan Pipanisasi	Dsn. Kemenyan	1 Unit	B	Memperlancar Kebutuhan Air Bersih
8	Pembangunan Sumur Gali	Dsn. Selutung dan Kemenyan	30 Unit	B	Memperlancar Kebutuhan Air Bersih
9	Pembangunan Kolam Ikan	Dsn. Selutung dan Kemenyan	10 Unit	B	Memperlancar ekonomi Desa
10	Pengadaan Tanah Wakaf	Dsn. Selutung	1 Paket	B	Memperlancar kegiatan sosial masyarakat
11	Pendirian BUMDes	Desa Selutung	1 Unit	B	Memperlancar Ekonomi Masyarakat
12	Pengembangan Benih Lokal	Dsn. Kemenyan	1 Paket	B	Memperlancar pengembangan ekonomi kelompok

					masyarakat
13	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Desa Selutung	1 Paket	B	Peningkatan kapasitas pertanian dan perikanan
14	Pembukaan Lahan Pertanian	Desa Selutung	20 Ha	B	Peningkatan Produksi Pertanian
15	Pembuatan Kandang ternak	Dsn. Selutung dan Kemenyan	6 Klmpok	B	Peningkatan Produksi Peternakan
16	Perlindungan Mata air	Dsn. Selutung dan Kemenyan	1 Kegiatan	B	Memperlancar aliran mata air
17	Pengadaan Hand Traktor	Dsn. Kemenyan	5 Unit	B	Meningkatkan produksi pertanian
18	Pengadaan Power Treser	Dsn. Kemenyan	5 Unit	B	Meningkatkan produksi pertanian
19	Pembangunan Gedung Sanggar Seni	Desa Selutung	1 Unit	B	Pelestarian Seni Budaya
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	Dsn. Selutung	1 Paket	B	Peningkatan kapasitas pendidikan
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Dsn. Selutung dan Kemenyan	1 Paket	B	Peningkatan sarana prasarana kesehatan
22	Pengembangan ternak secara Kolektif	Desa Selutung	10 Klmpok	B	Peningkatan peternakan kelompok
23	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Selutung	1 Unit	B	Peningkatan sarana membaca
24	Pembangunan Embung Desa	Desa Selutung	1 Unit	B	Peningkatan Sumber Air
25	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Desa Selutung	1 Paket	B	Peningkatan sarana perpustakaan

Sumber: RPJMDES Desa Selutung 2019

### **M. Alokasi Dana Desa Dan Dana Pembangunan Desa Di Desa Selutung.**

Pembangunan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah bersumber dari Dana Desa. program PKT Desa berjalan sejak tahun 2018, pada penelitian ini peneliti mengambil data dari tahun 2019 berjalan sampai pada tahun 2021 hal ini akan menggambarkan dengan baik bagaimana pengalokasian Anggaran Dana Desa di desa Selutung pada 3 tahun terakhir, yaitu sebelum terjadinya masa pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi covid 19, karena terjadinya pandemi covid 19 berpengaruh cukup besar pada perubahan pada pengalokasian anggaran Dana Desa, khususnya pada anggaran pelaksanaan pembangunan fisik yang merupakan bentuk dari program PKT Desa.

Selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2021 anggaran Dana Desa tertinggi ada pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 858.575.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta, lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp 847.211.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta, dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dan anggaran dana desa terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebanyak Rp 797.832.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dari grafik anggaran dibawah kita dapat melihat bahwa pada tahun 2019 sebelum terjadinya fenomena pandemi Covid-19 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan mencapai angka Rp 666.480.276 (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 77,7% (persen), dari seluruh anggaran Dana desa.

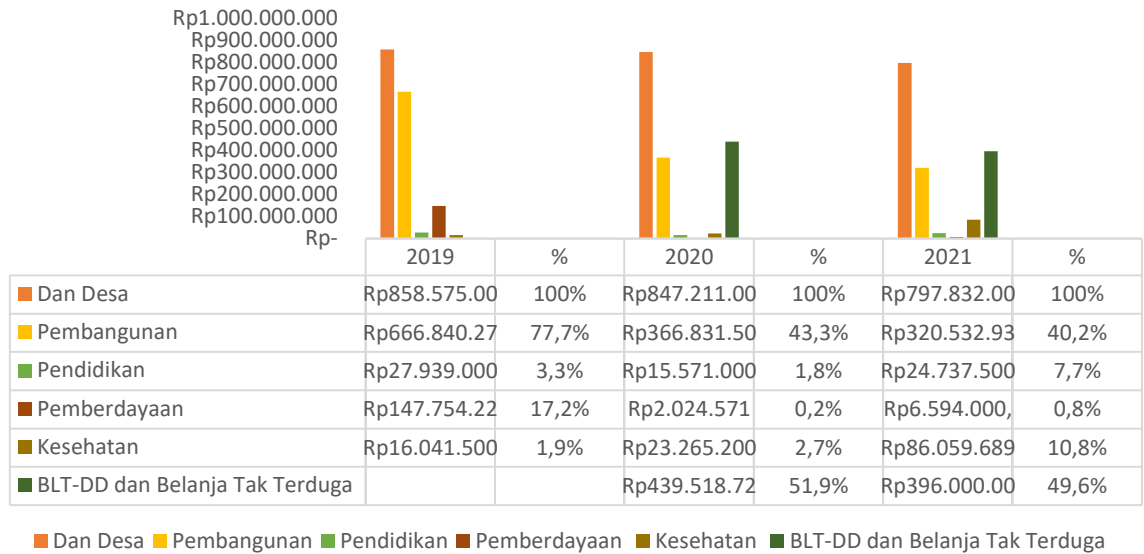


Sedangkan setelah terjadinya fenomena pandemi anggaran pembangunan desa Selutung mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebanyak Rp 336.831.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) atau sebesar 43,3% (persen) dari dana desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian anggaran dana pembangunan desa sejak terjadinya pandemi Covid-19 Berkurang sebanyak 34,4% (persen), dan anggaran pembangunan desa kembali mengalami penurunan pada tahun 2021, anggaran pembangunan yang dialokasikan adalah Rp 320.532.939,6 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma enam rupiah) atau sebesar 40,2% (persen), anggaran ini tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya yaitu dengan selisih 3,1% (persen).

Penurunan alokasi anggaran pembangunan di desa ini dikarenakan oleh terjadinya pandemi Covid-19, yang menyebabkan sebagian besar dana desa dialokasikan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di Desa Selutung, yaitu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maupun belanja darurat lainnya sebanyak Rp 439.518.729 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 51,9% (persen) pada tahun 2020 dan Rp 396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta ) atau 49,6% (persen) pada tahun 2021, dan selanjutnya dana desa dialokasikan pada bidang pendidikan sebesar 1,8%(persen) dan, pemberdayaan 0,2% (persen), dan kesehatan 2,7% (persen) pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 dana desa dialokasikan pada bidang pendidikan sebesar 7,7% (persen)

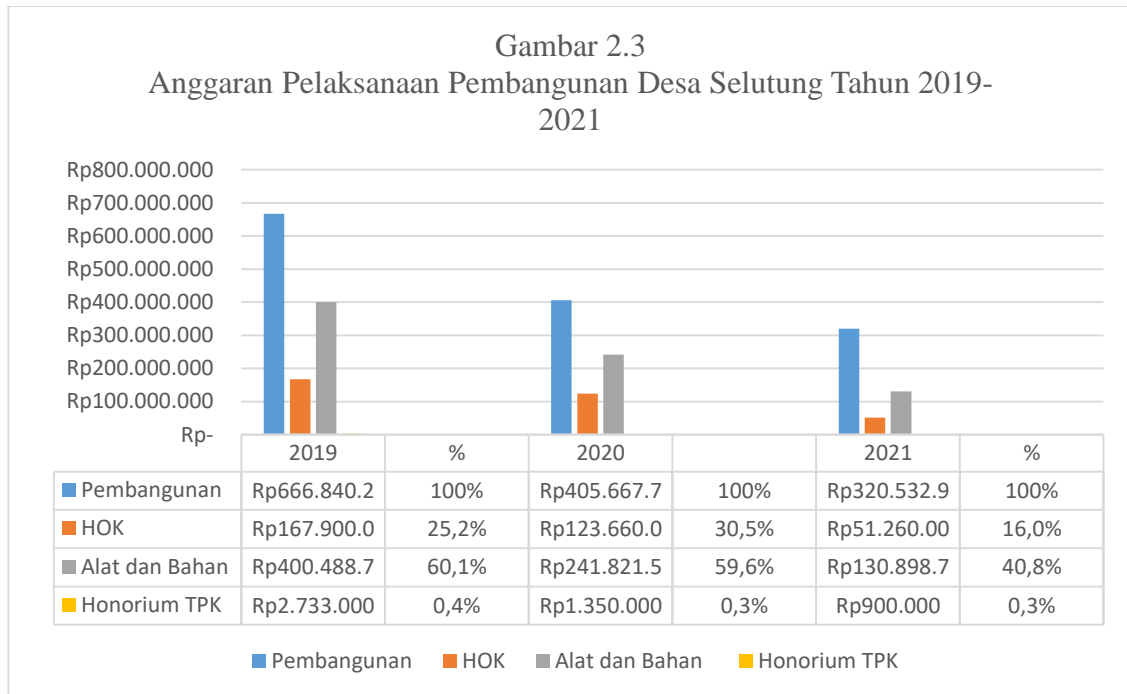
dan, pemberdayaan 0,8% (persen), dan kesehatan 10,8% (persen). Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa selama terjadinya pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan penurunan anggaran dana pembangunan tetapi juga pada bidang pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran dana desa untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 dengan berbagai upaya memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat desa sampai keadaan membaik. Dalam anggaran pembangunan meskipun anggaran berkurang cukup jauh pemerintah desa tetap bisa menjalankan program pembangunan meskipun dengan dana yang terbatas, dan pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dimana pembangunan tetap berjalan dengan tetap menaati protokol kesehatan. Untuk melihat lebih jelas perubahan anggaran Dana Desa dari sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19 di desa Selutung dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.2  
 Anggaran Dana Desa, Desa Selutung Tahun 2019-2021



Sumber: APBDES Desa Selutung 2019-2021

## N. Alokasi Dana Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Padat Karya Tunai Desa



Sumber: APBDES Desa Selutung 2019-2021

Anggaran pembangunan desa dalam program padat karya tunai desa dibagi dalam beberapa bidang yang *pertama* adalah pemberian upah secara langsung yaitu dalam bentuk upah harian yang diberikan kepada para pekerja pembangunan yang disebut dana (HOK) Harian Orang Kerja, dimana yang terlibat langsung dalam pengerjaan pembangunan ini adalah masyarakat desa itu sendiri, pada tahun 2019 dana HOK yang tersalurkan kepada masyarakat adalah Rp 167.900.000 (seratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebanyak 25,2% (persen). Pada tahun 2020 dana HOK yang ada adalah Rp 123.660.000 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau 30,5% (persen), dan pada tahun 2021 dana yang dialokasikan untuk HOK adalah Rp 51.620.000 (lima puluh satu juta enam ratus dua

puluh ribu rupiah) atau sebesar 16,0% (persen) dari keseluruhan dana pembangunan yang dianggarkan. Dengan ini kita dapat mengetahui bahwa dana yang dialokasikan untuk HOK setiap tahunnya berkurang, terutama pada tahun 2021 dana yang disalurkan berkurang hampir setengah dari tahun sebelumnya yaitu berkurang sebanyak 14,5% (persen), dana HOK yang berjumlah 16,0% artinya dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan HOK yang telah ditentukan yaitu minimal 30%. Sehingga dana yang tersalurkan untuk masyarakat juga akan berkurang. Pada masa pandemi aktivitas diluar rumah dan kegiatan yang menyebabkan kerumunan juga berkurang, artinya tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit, sehingga penerima manfaat dari program ini dalam bentuk pendapatan juga akan berkurang.

Yang kedua alokasi dana pembangunan juga digunakan untuk membeli alat dan bahan pembangunan. Biaya untuk membeli bahan dan alat pembangunan pada tahun 2019 adalah Rp 400.488.776 ( empat ratus juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 60,1% (persen), pada tahun 2020 dana yang dianggarkan adalah Rp 241.821.500 ( dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau 59,6% (persen), dan pada tahun 2021 dana yang dianggarkan adalah Rp 130.898. 750 (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 40,8% (persen). Seperti yang kita ketahui semenjak masa pandemi aktivitas masyarakat dibatasi, dan pada kegiatan pembangunan juga terbatas, sehingga kita dapat melihat pengurangan anggaran pada pembangunan dari tahun ketahun, dari anggaran alat dan bahan diatas rata-rata diatas 50 persen dari seluruh anggaran pembangunan, kecuali pada tahun 2021

yang kurang dari 50 persen yaitu sebesar 40,8 persen.

Yang ketiga dana pelaksanaan pembangunan digunakan untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan, 1 tim TPK akan memegang 1 jenis bangunan dan biasanya dilakukan oleh Kepala Dusun Dan Ketua RT DI desa. pada tahun 2019 sebanyak Rp 2.733.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 0,4% (persen), pada tahun 2020 adalah Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 0,3% (persen), dan pada tahun 2021 dana yang digunakan adalah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) atau 0,3% (persen) dari keseluruhan dana desa yang dianggarkan. Dari penjabaran anggaran dana pelaksanaan pembangunan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada masa pandemi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan berkurang setiap tahunnya, pelaksanaan pembangunan juga tidak dapat direalisasikan seperti sebelum terjadi pandemi. Desa tetap dapat melaksanakan pembangunan pada masa pandemi Covid-19, namun program PKT desa yang awalnya menargetkan untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa tidak dapat terlaksana secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib. (2020). *Padat Karya Tunai Desa*. Yogyakarta. Depublish(grup penerbitan CV BUDI UTAMA)
- Andryanto,S.D.(2021). *Tingkat Pengangguran Sampai 2, 56 Juta Orang, Kepala BPS: Imbas Pandemi Covid-19*. Tempo.co. diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1444706/tingkat-pengangguran-sampai-2-56-juta-orang-Kepala-bps-imbaspandemi-Covid-19/full&view=ok>
- Danial dan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Deni Herdiyana.(2019). Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pedesaan Provinsi Jawa Barat Dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* p-ISSN 0216-5287, e-ISSN 2614-5839 Volume 16, Issue 2
- CMS Untuk Akses Desa. <https://updesa.com/cms-untuk-website-desa/>
- Eko, Sutoro (2013). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:IRE.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- Izzati, R.A, (2021). *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*. The SMERU Research Institute. Diakses dari <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-Ncov)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-Ncov)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Moleong, lexy. J. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja.
- Novrizaldi. (2020). *Padat Karya Tunai Untuk Tangkal Dampak Covid-19 di Desa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/padat-karya-tunai-untuk-tangkal-dampak-Covid-19-di-desa>

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.Pdf.
- Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.Pdf
- Pratikno dan Cornelis Lay (2007). Bahan Ajar Politik Indonesia.Yogyakarta, S2 Politik-  
Fisipol-UGM.
- Pemerintah Desa Selutung. 2019. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selutung.  
Pemerintah Desa Selutung.2020. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selutung.  
Pemerintah Desa Selutung.2021. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selutung.  
Pemerintah Desa Selutung. 2020. Profil Desa Selutung.
- Pemerintah desa Selutung. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Ruhmaniati. 2018. Memperbaiki kebijakan padat karya tunai di desa. Jakarta. Smeru researce institute.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
- Santosa,Gede Prawira, (2021). *Artikel Opini: BLT-DD Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, Bagaimana dengan Infrastruktur?*. Diakses dari <http://sepang-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/675-Artikel-Opini--BLT-DD-Jadi-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021--Bagaimana-dengan-Infrastruktur->
- Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Suryani, Hendryadi. 2015. Metode riset kualitatif: teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi islam. Jakarta. PRENADA MEDIA GROUP
- Suyono, Bambang dan Hermawan, Hery. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Kerajinan Kulit di



Kabupaten Magetan. Jurnal Ekomaks, vol.2, no.2.  
Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Landak Launching CMS Desa. 22  
juni 2021.

<https://dpmpd.landakkab.go.id/berita/detail/tingkatkan-pengelolaan-keuangan-desa-bupati-landak-launching-cms-desa>

Ujang, Endi Kurnia dan Ni Wayan Widhiasthini. (2021). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Ilmiah uqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, E-ISSN: 2598-6236. Universitas muhamadiyah Tapanuli Selatan

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pdf.